

# Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah

1<sup>st</sup>Nugraeni<sup>1</sup>, 2<sup>nd</sup>Ratri Paramitalaksmi<sup>2</sup>, 3<sup>rd</sup>Zaenal Wafa<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Jalan Wates Km 10, Sedayu Bantul Yogyakarta Indonesia

nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id; a@institution.org

## Abstrak

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah. Salah satu alat untuk mengukur kinerja adalah Pemerintah Daerah adalah dengan rasio efektivitas dan rasio keserasian. Data diambil dari laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021. Hasilnya adalah 85% Pemerintah Daerah tidak efisien karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Rasio keserasian Pemerintah Daerah, memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin / operasi daripada belanja modal.

Kata kunci : efisiensi, keserasian, kinerja Pemerintah Daerah

## Abstract

Financial capability in the administration of a government is very important, because local governments will not be able to carry out their functions effectively and efficiently without sufficient costs to provide development services. Regional financial capacity in the era of regional autonomy is often measured using regional financial performance. One of the tools to measure the performance of the Regional Government is the effectiveness ratio and the compatibility ratio. The data is taken from the financial statements of the Regional Government in 2021. The result is that 85% of the Regional Government is inefficient because spending is greater than revenue. The compatibility ratio of the Regional Government, prioritizing the allocation of funds for routine/operational expenditures rather than capital expenditures.

Keywords: efficiency, harmony, local government performance

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2004, pasal 4).

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012). Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas tidak sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public dibelanjakan, namun kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik dibelanjakan secara efisien, efektif, ekonomis dan serasi. Efisien maksudnya penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal. Efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik. Ekonomis berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Serasi menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan secara optimal.

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio yang dapat digunakan antara lain Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

## METODE

Data yang digunakan adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Propinsi untuk tahun 2021. Alat analisis yang digunakan adalah rasio efisiensi dan rasio keserasian, dengan rumus sebagai berikut:

1. Rasio efisiensi

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi penerimaan}} \times 100\%$$

2. Rasio keserasian belanja

Dalam rasio keserasian ada 2 metode yaitu Rasio Belanja Operasional dan Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rasio Efisiensi

No	Propinsi	Rasio Efisiensi
1.	Propinsi Aceh	Tidak Efisien
2.	Propinsi Sumatera Utara	Tidak Efisien
3.	Propinsi Sumatera Barat	Tidak Efisien
4.	Propinsi Riau	Tidak Efisien
5.	Propinsi Jambi	Tidak Efisien
6.	Propinsi Sumatera Selatan	Tidak Efisien
7.	Propinsi Bengkulu	Tidak Efisien
8.	Propinsi Lampung	Tidak Efisien
9.	Propinsi DKI Jakarta	Kurang Efisien
10.	Propinsi Jawa Barat	Sangat Efisien
11.	Propinsi Jawa Tengah	Sangat Efisien
12.	Propinsi DI Yogyakarta	Tidak Efisien
13.	Propinsi Jawa Timur	Efisien
14.	Propinsi Kalimantan Barat	Tidak Efisien
15.	Propinsi Kalimantan Tengah	Tidak Efisien
16.	Propinsi Kalimantan Selatan	Tidak Efisien
17.	Propinsi Kalimantan Timur	Efisien
18.	Propinsi Sulawesi Utara	Tidak Efisien
19.	Propinsi Sulawesi Tengah	Tidak Efisien
20.	Propinsi Sulawesi Selatan	Tidak Efisien
21.	Propinsi Sulawesi Tenggara	Tidak Efisien
22.	Propinsi Bali	Tidak Efisien
23.	Propinsi NTB	Tidak Efisien
24.	Propinsi NTT	Tidak Efisien
25.	Propinsi Maluku	Tidak Efisien
26.	Propinsi Papua	Tidak Efisien
27.	Propinsi Maluku Utara	Tidak Efisien
28.	Propinsi Banten	Tidak Efisien
29.	Propinsi Bangka Belitung	Tidak Efisien
30.	Propinsi Gorontalo	Tidak Efisien
31.	Propinsi Kepulauan Riau	Sangat Efisien
32.	Propinsi Papua Barat	Tidak Efisien
33.	Propinsi Sulawesi Barat	Tidak Efisien
34.	Propinsi Kalimantan Utara	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari tabel 1, terlihat bahwa ada tiga (3) Pemerintah Daerah yang Sangat Efisien, dua (2) Pemerintah Daerah Efisien dan dua puluh Sembilan (29) Pemerintah Daerah Tidak Efisien. Hal ini berarti 85% Pemerintah Daerah Propinsi mengalami lebih banyak pengeluaran daripada realisasi penerimaan. Tahun 2021 adalah tahun kedua wabah pandemic covid 19 melanda di seluruh dunia. Pengeluaran Pemerintah Daerah lebih besar daripada penerimaan. Pengeluaran untuk membiayai rutin maupun untuk menangani bencana pandemic covid 19 ini. Sementara untuk penerimaan mengalami penurunan, hal ini karena masyarakat masih takut untuk bepergian ke tempat wisata. Yang berakibat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari wisata dan retribusi juga mengalami penurunan. Penerimaan pajak mengalami penurunan,

terutama pajak kendaraan bermotor, meskipun pemerintah menghapus sanksi denda keetrlambatan membayar pajak kendaraan bermotor selama tahun 2021. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemda dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 2. Rasio Keserasian

No	Propinsi	Rasio Belanja Operasi	Rasio Belanja Modal
1.	Propinsi Aceh	0,58	0,42
2.	Propinsi Sumatera Utara	0,67	0,33
3.	Propinsi Sumatera Barat	0,69	0,31
4.	Propinsi Riau	0,56	0,44
5.	Propinsi Jambi	0,67	0,43
6.	Propinsi Sumatera Selatan	0,62	0,38
7.	Propinsi Bengkulu	0,63	0,37
8.	Propinsi Lmapung	0,65	0,35
9.	Propinsi DKI Jakarta	0,44	0,56
10.	Propinsi Jawa Barat	0,74	0,26
11.	Propinsi Jawa Tengah	0,69	0,31
12.	Propinsi DI Yogyakarta	0,67	0,33
13.	Propinsi Jawa Timur	0,66	0,34
14.	Propinsi Kalimantan Barat	0,59	0,41
15.	Propinsi Kalimantan Tengah	0,54	0,46
16.	Propinsi Kalimantan Selatan	0,52	0,38
17.	Propinsi Kalimantan Timur	0,58	0,44
18.	Propinsi Sulawesi Utara	0,61	0,39
19.	Propinsi Sulawesi Tengah	0,53	0,47
20.	Propinsi Sulawesi Selatan	0,73	0,37
21.	Propinsi Sulawesi Tenggara	0,63	0,37
22.	Propinsi Bali	0,62	0,38
23.	Propinsi NTB	0,56	0,44
24.	Propinsi NTT	0,61	0,39
25.	Propinsi Maluku	0,53	0,47
26.	Propinsi Papua	0,63	0,37
27.	Propinsi Maluku Utara	0,63	0,37
28.	Propinsi Banten	0,62	0,38
29.	Propinsi Bangka Belitung	0,54	0,46
30.	Propinsi Gorontalo	0,60	0,40
31.	Propinsi Kepulauan Riau	0,52	0,48
32.	Propinsi Papua Barat	0,68	0,32
33.	Propinsi Sulawesi Barat	0,51	0,49
34.	Propinsi Kalimantan Utara	0,48	0,52

Dari tabel 2, terlihat bahwa ada 2 Pemerintah Daerah yang lebih banyak belanja modal, sedang 94% Pemerintah Daerah lebih banyak pengeluaran untuk belanja operasi. Untuk penanganan pandemic covid 19 ini, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan biaya yang besar, dan masuk dalam biaya operasi. Sehingga wajar jika rasio keserasian lebih banyak untuk belanja operasi daripada belanja modal. Biaya operasi ini lebih untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan public, terutama Kesehatan. Antara lain untuk biaya vaksin bagi masyarakat, biaya hidup warga yang isolasi di shelter yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, serta untuk biaya penanganan di Rumah Sakit. Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Abdul Halim, 2012).

#### **KESIMPULAN**

1. Dari rasio efisiensi, 85% Pemerintah Daerah tidak efisien karena lebih banyak pengeluaran daripada penerimaan.
2. Dari rasio keserasian, 94% Pengeluaran Pemerintah Daerah adalah untuk biaya operasi daripada belanja modal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, Syam Kusufi, 2012, *Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep dan Aplikasi*, Salemba Empat, Jakarta
- Joko Pramono, 2014, *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; studi kasus di Pemerintah Kota Surakarta*, STIE AMA Surakarta.
- Judy Julian, Jenny, 2017, *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015*, *Jurnal Accountability*, Volume 06, Nomor 01, 45-56
- Christian, Lintje, Natalia, 2017, *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon*, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2), 782-791

Oliviana, Juntje, Dhullo, 2019, Analisis Penilaian Kinerja Sektor Publik Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal EMBA*, volume 7 nomor 3

Marratus Sholikhah, 2017, Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945